



ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA TIDAK BAKU PADA PIDATO PEJABAT PUBLIK

ANALYSIS OF NON-STANDARD USAGE ERRORS IN PUBLIC OFFICIALS' SPEECHES

**Humaira Ananda Pribadi¹, Camelia Duha², Ester Dwi Celine Purba³, Juli Mona Pita
Tampubolon⁴, Mira Yusira Lubis⁵, Vanny Septania Br Pinem⁶, Lasenna Siallangan⁷**

Universitas Negeri Medan

Email : pribadimai23@gmail.com¹, cameliaduha00@gmail.com², esterpurbaaa@gmail.com³
julimonapita@gmail.com⁴, mirayusira@gmail.com⁵, vaniseptania3@gmail.com⁶, siallaganlasenna@unimed.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 17-04-2025

Revised : 19-04-2025

Accepted : 21-04-2025

Pulished : 23-04-2025

Abstract

This research aims to analyse the use of non-standard language in the speech of public official Mr Luhut Binsar Panjaitan, identify its impact on professionalism and message clarity, and provide recommendations for improvement based on standard language principles. The method used is descriptive-qualitative with data collection techniques through analysis of speech transcripts, what is done in this study is listening, analysing, and recording followed by data analysis in this study using four stages, namely data collection, data reduction, data presentation and finally conclusion drawing. The results of the study identified five main problem categories: (1) the use of nonstandard words (gaptek, nggak) which need to be replaced with formal terms (information technology, not); (2) ineffective sentence structure ('As per Indonesian') which is improved with subject-predicate-object pattern; (3) language mixing ('We are doing right') which is suggested to be changed to formal Indonesian; (4) the use of slang words (so good so far) in official contexts; and (5) inappropriate word choice ('claiming sana sini') which needs to be adjusted to the context. The findings show that language unfamiliarity reduces professionalism and hinders audience comprehension. Key recommendations include the avoidance of slang words, the construction of coherent sentences, and the selection of formal vocabulary. The implementation of standardised language principles is expected to improve the quality of official communication, making it more effective in conveying messages and maintaining institutional integrity. This research emphasises the importance of language awareness to strengthen national identity.

Keywords : Non-Standard Language, Linguistic Errors, Governmental Institutional Communication

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa tidak baku pada pidato pejabat publik Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Mengidentifikasi dampaknya terhadap profesionalisme dan kejelasan pesan, serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis prinsip bahasa baku. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis transkrip pidato, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mendengarkan, menganalisis, dan mencatat dilanjutkan dengan analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi lima kategori masalah utama: (1) penggunaan kata tidak baku (gaptek, nggak) yang perlu diganti dengan istilah formal (teknologi informasi, tidak); (2) struktur kalimat tidak efektif ("Sesuai orang Indonesia") yang diperbaiki dengan pola subjek-predikat-objek; (3) pencampuran bahasa ("We are doing right") yang disarankan diubah ke bahasa Indonesia formal; (4) penggunaan kata gaul (so good so far gitu) dalam konteks resmi; serta (5) pemilihan kata kurang tepat ("mengklaim sana sini") yang perlu disesuaikan konteks. Temuan menunjukkan



bahwa ketidakbakuan bahasa mengurangi profesionalisme dan menghambat pemahaman audiens. Rekomendasi utama mencakup penghindaran kata gaul, penyusunan kalimat koheren, dan pemilihan kosakata formal. Implementasi prinsip bahasa baku diharapkan meningkatkan kualitas komunikasi resmi, menjadikannya lebih efektif dalam menyampaikan pesan serta menjaga integritas institusi. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran berbahasa sesuai kaidah untuk memperkuat identitas nasional.

Kata Kunci : Bahasa Tidak Baku, Kesalahan Linguistik, Komunikasi Instansi

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 36. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 telah mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Menurut undang-undang tersebut bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa resmi negara memiliki peran penting untuk mempersatukan bangsa dan menjadi identitas negara. Penggunaan bahasa baku menjadi standar dalam komunikasi formal, seperti di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia terutama bahasa Indonesia baku, menjadi tolak ukur masyarakat dalam beradab dan berbudaya. Namun, pada kenyataannya penggunaan bahasa Indonesia masih belum sesuai dengan kaidah baku, mulai dari komunikasi lisan maupun tulisan, bahkan penggunaannya menurun dengan signifikan.

Dalam pandangan lebih luas, penting untuk diingat bahwa bahasa baku bukan hanya masalah tata bahasa semata, tetapi juga melibatkan konteks budaya, sosial, dan politik. Penggunaan bahasa yang tidak teratur dan tidak tepat tentu saja akan menyulitkan pendengar serta pembaca untuk dapat saling berkomunikasi. Keteraturan dan ketepatan dalam berbahasa pasti akan memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang sangat luas dan mendalam mengenai ilmu kebahasaan. Oleh karena itu, penulis jurnal ini juga perlu merinci bagaimana konsep bahasa baku yang terdapat di pemerintahan. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesalahan penggunaan bahasa tidak baku yang terdapat dalam dunia pemerintahan. Sedangkan Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesalahan penggunaan bahasa tidak baku pada pidato pejabat publik Bapak Luhut Binsar Panjaitan.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Sedangkan metode penelitian yang digunakan Kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Menurut Hunowu (2019) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Refereni. Dapat disimpulkan bahwa Deskriptif- Kualitatif adalah suatu penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah



mendengarkan, menganalisis, dan mencatat. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah salah satu pejabat publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia tidak baku dalam komunikasi resmi pejabat publik, mengidentifikasi dampaknya terhadap profesionalisme dan kejelasan pesan, serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis prinsip bahasa baku. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas komunikasi formal, menjaga integritas institusi, dan memperkuat identitas nasional melalui penerapan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil dan Pembahasan

No	Kategori		Temuan	Perbaikan yang disarankan
1	Penggunaan Kata Baku	Tidak	Kata seperti "gaptek", "gelap", dan "kami melihat harapan" digunakan dalam komunikasi resmi.	Gunakan istilah yang lebih formal, misalnya "teknologi informasi", "kurang optimis", dan "kami optimis terhadap masa depan".
2	Struktur Kalimat Efektif	Tidak	Kalimat seperti "Sesuai orang Indonesia" dan "Di mana yang lapangan kerja nggak kurang" tidak memiliki struktur yang jelas.	Perbaikan struktur kalimat agar lebih efektif, misalnya "Sebagai orang Indonesia, kita harus bangga" dan "Di mana pun, masalah lapangan kerja tetap ada"
3	Penggunaan Campuran	Bahasa	Frasa seperti "We are doing right" dan "So good so far gitu" ditemukan dalam transkrip resmi.	Gunakan bahasa Indonesia yang formal, seperti "Kita sudah berada di jalur yang benar" dan "Sejauh ini, semuanya berjalan baik".
4	Kata Gaul Komunikasi Resmi	dalam	Penggunaan kata seperti "nggak" yang seharusnya lebih baku.	Gunakan kata "tidak" untuk menjaga keformalan bahasa.
5	Pemilihan Kata Tepat	Kurang	Frasa seperti "Jangan terus mengklaim sana sini" dan "Sebesar ruangan ini itu melakukan pekerjaan ini" tidak sesuai konteks.	Gunakan istilah yang lebih jelas, seperti "Jangan terus- menerus menyalahkan" dan "Di ruangan sebesar ini, mereka bekerja mengerjakan tugas tersebut.".

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam komunikasi resmi, penting untuk menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan efektif. Penggunaan kata tidak baku, struktur kalimat yang kurang efektif, serta pencampuran bahasa dapat mengurangi profesionalisme dan menghambat pemahaman audiens. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek berikut:



1. Menghindari penggunaan kata gaul dan bahasa campuran.
2. Menyusun kalimat dengan struktur yang lebih efektif.
3. Memilih kata yang sesuai dengan konteks formal

Dengan menerapkan prinsip bahasa yang baik dan benar, komunikasi resmi dapat menjadi lebih profesional, jelas, dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa dalam komunikasi resmi masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, ditemukan penggunaan kata tidak baku seperti "gaptek" dan "nggak" yang mengurangi tingkat keformalan, sehingga disarankan untuk menggantinya dengan istilah formal seperti "teknologi informasi" atau "tidak". Kedua, struktur kalimat yang tidak efektif, misalnya "Sesuai orang Indonesia" dan "Di mana yang lapangan kerja nggak kurang", mengganggu kejelasan pesan. Perbaikan struktur kalimat dengan pola subjek-predikat-objek yang tepat, seperti "Sebagai orang Indonesia, kita harus bangga", dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Ketiga, pencampuran bahasa asing ("We are doing right") dan penggunaan bahasa gaul ("so good so far gitu") dalam konteks resmi berpotensi mengurangi profesionalisme. Solusinya, penggunaan frasa formal dalam bahasa Indonesia seperti "Kita sudah berada di jalur yang benar" dan "Sejauh ini, semuanya berjalan baik" perlu dioptimalkan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidaktepatan pemilihan kata dan struktur kalimat tidak hanya menghambat pemahaman audiens, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran akan prinsip bahasa baku dalam konteks formal. Oleh karena itu, rekomendasi utama mencakup tiga aspek: (1) menghindari kata gaul dan bahasa campuran, (2) menyusun kalimat dengan struktur yang koheren, serta (3) memilih kosakata yang sesuai konteks. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi resmi, menjadikannya lebih profesional, jelas, dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dengan demikian, integritas dan kredibilitas institusi atau individu dalam berkomunikasi secara formal dapat terjaga secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada Ibu Lasenna Siallagan atas bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses penulisan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman satu kelompok yang telah ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam penyelesaian jurnal tersebut.

Tanpa dukungan, doa, dan semangat dari semua pihak, jurnal ini tidak akan tersusun dengan baik. Harapan penulis semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih ilmu yang berguna bagi semua para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, A. R., Rabbani, B. R., dkk. (2024). Pentingnya Bahasa Baku Dalam Dokumen Hukum. *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1715-1729.



- Hunowu, F. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muammar, & La Djamudi, N. (2023). PKM Bimbingan Teknis Penggunaan Bahasa Baku dan Kalimat Efektif Dalam Surat Dinas. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(5), 391-398.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, R., Listiyawati, L., dkk. (2022). Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Instansi Pemerintah. Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis, 3(2), 80-84.